

KAJIAN PROBLEMATIKA MAHALNYA BIAYA PENDIDIKAN YANG ADA DI INDONESIA

Kartika Sari^{✉1}, Ari Wibowo²

Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas PGRI Yogyakarta

✉Korespondensi: Dherma Kesumayodra

E-mail: tikasari4600@gmail.com

Received: 16 Juli 2024

Accepted: 26 Juli 2024

Published: 1 Agustus 2024

ABSTRACT

This research aims to examine the issue of expensive education costs that are prevalent today. The method employed is a case study focusing on several past incidents. A case study is an in-depth and detailed research method that examines one or more specific cases with the goal of thorough understanding. Financing education is a crucial aspect that supports the sustainability and quality of education. School leaders play a crucial role in optimizing the use of school funds. This study also investigates the planning of funds in schools, namely the School Revenue and Expenditure Budget Plan (RAPBS). RAPBS serves not only as a financial management tool for schools but also ensures transparency, accountability, and effectiveness in the use of resources to enhance the quality of education in schools.

Kata Kunci: Education, Cost, Expensive, School, Budget Plan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji problematika mahalny biaya pendidikan yang kini banyak terjadi. Metode yang digunakan ialah studi kasus mengenai beberapa kejadian yang telah terjadi. Studi kasus adalah metode penelitian yang mendalam dan terperinci terhadap satu atau beberapa kasus yang spesifik, dengan tujuan untuk memahami secara mendalam tentang kasus tersebut. Pembiayaan pendidikan merupakan aspek krusial yang menopang kelangsungan dan kualitas pendidikan. Pemimpin sekolah memiliki peran krusial dalam mengoptimalkan penggunaan dana sekolah. Penelitian ini juga mengkaji terkait perencanaan dana di sekolah yaitu Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS). RAPBS tidak hanya sebagai instrumen pengelolaan keuangan sekolah, tetapi juga sebagai alat untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah.

Keyword: Pendidikan, Biaya, Mahal, Sekolah, Rencana Anggaran.

PENDAHULUAN

Manusia hidup dalam perkembangan. Hidup yang dilaksanakannya selalu diusahakan supaya dapat berkembang. Perkembangan tersebut dibutuhkan untuk

mempermudah kehidupan yang dijalannya. Selain itu, perkembangan dilakukan secara alamiah untuk terus meningkatkan kualitas hidupnya. Perkembangan tersebut dapat diupayakan menggunakan pendidikan.

Pendidikan adalah proses yang dilalui oleh manusia dalam mengembangkan dan melatih kemampuan yang dimilikinya. Pendidikan adalah usaha secara sadar dan terencana dalam mewujudkan suasana belajar yang nyaman, aman, dan berkesinambungan (Prastiwanti, 2022). Pendidikan dilaksanakan dengan usaha secara sadar oleh pendidik dan terdidik. Pendidik dalam konteks sekolah adalah seorang guru, sedangkan terdidik adalah seorang siswa. Dari keduanya, dibutuhkan usaha untuk menumbuhkan kemauan dalam melaksanakannya (Djamaluddin, 2014). Pendidikan dilaksanakan untuk mempersiapkan individu dalam menghadapi kehidupan dengan pengetahuan dan kecerdasan yang diasah di dalam proses pendidikan. Karenanya, pendidikan sangatlah penting terutama bagi anak-anak.

Pendidikan di Indonesia, yang dilaksanakan oleh sekolah, diatur oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Republik Indonesia. Didalamnya, telah ada banyak Undang-Undang dan berbagai aturan yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pendidikan. Selain itu, ada pula berbagai fasilitas perangkat ajar seperti kurikulum dan berbagai dokumen pendukung lainnya yang disiapkan guna menunjang proses pembelajaran.

Namun, masih ada beberapa kendala yang ada di dalam proses pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Salah satunya adalah masalah aksesibilitas, terutama di daerah pedesaan. Kualitas pendidikan juga menjadi perhatian, terutama terkait dengan kurikulum

dan kualifikasi guru. Infrastruktur pendidikan masih perlu ditingkatkan, sementara kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan serta antara sekolah negeri dan swasta masih ada. Pemerintah terus berupaya meningkatkan pendidikan, meskipun masih ada tantangan yang perlu diatasi. Salah satu hal yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat ialah mahalnya biaya pendidikan.

Biaya pendidikan yang ada di Indonesia masih tergolong mahal. Banyak sekolah yang membandrol biaya pendidikan dengan harga tinggi. Walau begitu, ada pula yang memberikan harga yang tidak terlalu mahal. Namun, sebenarnya biaya pendidikan juga telah dicover oleh pemerintah. Banyak dana bantuan yang didapatkan oleh sekolah seperti dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah), BOSDA (BOS Daerah), dan lain sebagainya. Tapi kenapa biaya sekolah yang ada di Indonesia masih mahal?

Banyak anak yang putus sekolah karena keterbatasan biaya. Mereka memilih bekerja dan tidak melanjutkan sekolah karena dirasa orangtuanya tidak mampu membayar biaya sekolah. Selain itu ada juga kasus di banyak sekolah yang tidak memperbolehkan siswanya mengikuti ujian apabila belum membayar biaya sekolah. Dan lebih parahnya lagi, ada beberapa sekolah yang menahan ijazah atau surat-surat penting lainnya yang dimiliki oleh siswa yang telah lulus apabila belum melunasi biaya pendidikannya.

Kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan orang tua, apalagi menyalahkan sekolah. Orang tua memiliki berbagai macam

latar belakang yang tidak semua orang miliki. Mereka berasal dari berbagai macam kondisi sosial dan ekonomi yang berbeda. Sementara kita juga tidak bisa menyalahkan sekolah karena pada dasarnya sekolah juga memiliki sistem dan operasional tersendiri yang telah disepakati oleh guru, wakil orang tua siswa, dan komite sekolah. Pemerintah juga telah memberikan biaya bantuan yang tidak sedikit kepada sekolah dalam berbagai macam bentuk.

1. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Indonesia

a) Hakikat Ekonomi

Ekonomi berasal dari bahasa latin Oikos yang berarti rumah tangga dan Nomos yang berarti aturan. Sehingga ekonomi bisa diartikan sebagai aturan-aturan dalam rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan. Seiring dengan berjalannya waktu, aturan-aturan tersebut berubah menyesuaikan perubahan dan perkembangan yang terjadi. Karenanya pengertian dari ekonomi dari beberapa orang bisa saja berbeda.

Ekonomi dapat juga diartikan sebagai sebuah ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia dalam mengalokasikan sumber daya yang tersedia disekitarnya untuk mencapai tujuan tertentu (Smith, 1776). Sumber daya yang tersedia tentunya terbatas dan tidak sama antara satu daerah dengan daerah yang lainnya. Oleh karena itu, diperlukan pertukaran barang dan jasa serta kerjasama antar pelaku ekonomi.

Kegiatan ekonomi dilaksanakan guna mengusahakan terpenuhinya kebutuhan

manusia. Berbagai kebutuhan manusia kebanyakan dapat dipenuhi menggunakan uang. Uang adalah alat tukar barang yang sah oleh peraturan. Adanya uang, memungkinkan kita untuk menukarkan barang sesuai dengan harga yang dapat dipatok atau dihitung. Uang bisa untuk membeli barang maupun jasa. Salah satu jasa yang dapat dibeli dengan uang adalah pendidikan.

b) Hakikat Sosial

Sosial ialah ilmu yang mempelajari hubungan antar manusia. Ada beberapa pengertian menurut pendapat ahli, seperti yang dikutip oleh Nasrullah sebagai berikut:

Durkheim memiliki pendapat bahwa setiap manusia memberikan kontribusi kepada masyarakat melalui aksi yang dilakukannya. Hal itu disebutkan dengan merujuk kepada kenyataan sosial yang terjadi (Nasrullah, 2017). Itu berarti bahwa hampir semua kegiatan yang dilakukan manusia melibatkan hubungan dengan manusia yang lain atau masyarakat. Hubungan tersebut perlu dibina dengan baik supaya kegiatan yang dilakukan tidak merugikan satu sama lain.

Sementara Marx menyebutkan bahwa sosial berupa hubungan kerjasama antar manusia (co-operative work). Dengan melihat fakta dalam kehidupan bahwa setiap hubungan manusia merupakan kerjasama apapun kondisinya untuk saling mendukung. (Nasrullah, 2017). Kerjasama antar manusia diharapkan saling memberikan dampak positif sebagaimana sebuah proses produksi dimana setiap mesin saling bekerjasama memberikan kontribusi yang baik bagi barang produksinya.

Dalam kajian tersebut, terdapat penekanan bahwa sosial berarti terdapatnya karakter kerjasama antar manusia yang saling mengisi dan bersinergi untuk menumbuhkan hubungan masyarakat yang terus lebih baik.

Dari pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sosial berarti hubungan antar manusia yang dilakukan melalui kerjasama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selain itu, hubungan sosial harus dibina dengan baik guna meminimalisir kerugian yang diderita oleh salah satu atau seluruh masyarakat yang terlibat. Hal tersebut harus dimanfaatkan untuk mendukung berbagai bidang, salah satunya dalam bidang pendidikan.

Hubungan sosial antar individu dapat mempengaruhi pendidikan seseorang. Dukungan sosial merupakan salah satu faktor yang dapat memberikan motivasi bagi seseorang untuk mencapai prestasi (Putri, 2014). Karenanya diperlukan lingkungan yang baik sehingga bisa memberikan dukungan terhadap pendidikan yang dicapai. Seseorang akan merasa bahagia dan tidak tertekan apabila didukung oleh lingkungan sekitarnya, terutama keluarga. Hal demikian berpengaruh kepada proses belajar seseorang. Itulah mengapa hubungan sosial merupakan kerjasama yang harus saling menguntungkan agar tercapai tujuan dan keinginan satu sama lain.

c) Hakikat Sosial Ekonomi

Sosial ekonomi memiliki artian lain bila disandingkan. Bukan lagi tentang definisi sosial dan ekonomi secara tunggal. Sosial

ekonomi adalah kedudukan atau posisi seseorang dalam kelompok masyarakat yang ditentukan oleh jenis aktivitas ekonomi, pendidikan serta pendapatan (Wayan, 2014). Menurut Kusnadi (2019) sosial ekonomi adalah kondisi kependudukan yang ada meliputi tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, tingkat kesehatan, tingkat konsumsi, perumahan, dan lingkungan masyarakat. Jadi sosial ekonomi adalah kondisi seseorang sesuai dengan tingkatan ekonominya yang berpengaruh terhadap tingkat sosialnya.

2. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Indonesia

Kondisi sosial ekonomi adalah suatu kedudukan yang diatur secara sosial dan menempatkan seseorang pada posisi tertentu dalam masyarakat, di mana posisi ini disertai dengan seperangkat hak dan kewajiban yang harus dijalankan oleh individu tersebut (Sumardi, 2001). Sastropradja (2000) menjelaskan bahwa kondisi sosial ekonomi adalah keadaan atau kedudukan seseorang dalam masyarakat sekelilingnya. Malo (2001) juga memberikan batasan mengenai kondisi sosial ekonomi sebagai suatu kedudukan yang diatur secara sosial dan menempatkan seseorang pada posisi tertentu dalam masyarakat. Pemberian posisi ini juga disertai dengan seperangkat hak dan kewajiban yang harus dimainkan oleh individu tersebut. Kondisi sosial ekonomi masyarakat ditandai dengan adanya saling kenal-mengenal antar satu sama lain, paguyuban, sifat gotong-royong, dan kekeluargaan.

Mengenai kondisi sosial ekonomi, Yulianti yang dikutip oleh Arifin (2002) menjelaskan bahwa kondisi sosial ekonomi adalah hubungan antara status sosial dan kebiasaan hidup sehari-hari yang telah membudaya bagi individu atau kelompok, di mana kebiasaan hidup ini biasanya disebut dengan aktivitas budaya atau *culture activity*. Ia juga menambahkan bahwa dalam semua masyarakat di dunia, baik yang sederhana maupun yang kompleks, pola interaksi atau pergaulan hidup antar individu menunjukkan perbedaan kedudukan dan derajat atau status. Kriteria untuk membedakan status dalam masyarakat kecil biasanya sangat sederhana, karena selain jumlah warganya yang relatif sedikit, orang-orang yang dianggap memiliki status tinggi juga tidak banyak jumlah maupun ragamnya.

Menurut Sumardi dan Evers (2002), kondisi sosial ekonomi adalah suatu kedudukan yang diatur secara rasional dan menetapkan seseorang pada posisi tertentu dalam masyarakat. Pemberian posisi ini disertai dengan seperangkat hak dan kewajiban yang harus dijalankan oleh individu tersebut. Menurutnya pula ada beberapa kriteria keadaan sosial ekonomi yang berada di atas yaitu sebagai berikut :

- a. Lebih berpendidikan.
- b. Mempunyai status sosial yang ditandai dengan tingkat kehidupan, kesehatan, pekerjaan, dan pengenalan diri terhadap lingkungan.
- c. Mempunyai tingkat mobilitas ke atas lebih besar.

- d. Mempunyai ladang luas
- e. Lebih berorientasi pada ekonomi komersial produk.
- f. Mempunyai sikap yang lebih berkenaan dengan kredit.
- g. Pekerjaan lebih spesifik.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut dapat dinyatakan bahwa kondisi sosial ekonomi adalah posisi individu dan kelompok yang berkenaan dengan ukuran rata-rata yang berlaku umum tentang pendidikan, pemilikan barang-barang, dan partisipasi dalam aktivitas kelompok dari komunitasnya, sedangkan kondisi sosial ekonomi kaitanya dengan status sosial ekonomi itu sendiri dengan kebiasaan hidup sehari-hari individu atau kelompok.

Keluarga merupakan faktor utama dalam menentukan tingkat ketercapaian pendidikan anak-anak. Namun, pendidikan dalam keluarga tidak semata-mata tergantung pada keluarga itu sendiri, karena keluarga hidup berdampingan dengan keluarga-keluarga lain. Pengaruh dari keluarga lain tidak boleh diabaikan, begitu pula dengan unsur-unsur lain dalam masyarakat, yang semuanya disebut sebagai kondisi sosial (Soekanto, 2002). Mengenai kondisi sosial ekonomi, Soekanto yang dikutip oleh Arifin (2002) menjelaskan bahwa kondisi sosial ekonomi adalah hubungan antara status sosial dan kebiasaan hidup sehari-hari yang telah membudaya bagi individu atau kelompok, yang biasanya disebut dengan aktivitas budaya. Ia juga menjelaskan bahwa dalam semua masyarakat di dunia, baik yang sederhana maupun yang kompleks, pola interaksi atau pergaulan hidup antara individu

menunjukkan perbedaan kedudukan dan derajat atau status. Kriteria untuk membedakan status dalam masyarakat kecil biasanya sangat sederhana, karena selain jumlah warganya yang relatif sedikit, juga orang-orang yang dianggap memiliki status tinggi tidak banyak jumlah maupun ragamnya.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut dapat dinyatakan bahwa kondisi sosial ekonomi adalah posisi individu dan kelompok yang berkenaan dengan ukuran rata-rata yang berlaku umum tentang pendidikan, pemilikan barang-barang, dan partisipasi dalam aktivitas kelompok dari komunitasnya, sedangkan kondisi sosial ekonomi kaitannya dengan status sosial ekonomi itu sendiri dengan kebiasaan hidup sehari-hari individu atau kelompok.

Faktor sosial ekonomi dalam pendidikan mempengaruhi dukungan dan motivasi bagi siswa. Dengan adanya dukungan orangtua dan lingkungan bagi siswa untuk memiliki pendidikan yang baik, maka akan didapatkan hasil yang baik pula. Orangtua dengan status sosial tinggi cenderung memberikan pendidikan terbaik bagi anaknya supaya bisa sejajar atau bahkan lebih tinggi dari mereka.

Pendidikan merupakan salah satu bentuk pembangunan nasional untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat, sehingga terwujud masyarakat yang cerdas, maju, dan sejahtera. Pendidikan merupakan modal sosial yang strategis dan realistis dalam pembangunan. Hal ini berkaitan dengan keberhasilan dalam pembangunan yang tidak hanya dilihat dari segi ekonomi dan material

yang dimiliki, melainkan ditentukan juga oleh Sumber Daya Manusia (SDM). Oleh karena itu Negara kita memberikan perhatian serius dalam bidang pendidikan, mulai dari Pendidikan Usia Dini (PAUD) sampai Perguruan Tinggi.

Keluarga merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi belajar anak dan merupakan lembaga sosial pertama yang dikenal oleh anak yang selanjutnya dapat ditanamkan sikap-sikap yang dapat mempengaruhi perkembangan anak. Keluarga bertanggung jawab menyediakan dana untuk kebutuhan pendidikan anak. Keluarga yang keadaan sosial ekonominya tinggi tidak akan banyak mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sekolah anak, berbeda dengan orang tua yang keadaan sosial ekonominya rendah.

Keluarga merupakan lingkungan sosial yang pertama yang dikenalkan kepada anak atau dapat dikatakan bahwa seorang anak mengenal kehidupan sosial itu pertama-tama di dalam lingkungan keluarga. Adanya interaksi antar anggota keluarga yang satu dengan yang lain menyebabkan seorang anak menyadari akan dirinya, bahwa ia berfungsi sebagai individu dan juga makhluk sosial. Sebagai individu dia harus memenuhi segala kebutuhan hidupnya demi untuk kelangsungan hidupnya di dunia ini. Sebagai makhluk sosial, dia harus menyesuaikan diri dengan kehidupan bersama yaitu, saling tolong menolong dan mempelajari adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat. Adat-istiadat tersebut yang memperkenalkan adalah orang

tuanya yang nantinya dimiliki oleh anak itu sehingga dengan demikian perkembangan seorang anak dalam keluarga itu sangat ditentukan oleh kondisi situasi keluarga dan pengalaman-pengalaman yang dimiliki orang tuanya.

Keluarga merupakan lingkungan pertama bagi anak, karena di lingkungan keluargalah anak pertama-tama mendapat pengaruh sadar. Tugas keluarga adalah meletakkan dasar bagi perkembangan anak berikutnya, sehingga anak dapat berkembang dengan baik. Dalam lingkungan keluarga, anak pertama kali mendapatkan pendidikan dan bimbingan serta belajar tentang semua hal, baik pengetahuan, percakapan dan sebagainya. Oleh karena itu, orang tua harus mampu mengarahkan, membantu mengembangkan minat dan bakat yang dimiliki anak sehingga anak dapat berprestasi dengan baik. Selain relasi antar anggota keluarga yang harmonis dan cara orang tua dalam mendidik anak, keadaan sosial ekonomi keluarga juga ikut menentukan prestasi belajar anak.

Keluarga yang berstatus sosial ekonomi baik akan mampu menyediakan situasi yang baik bagi perkembangan pendidikan anak dan anggota keluarga. Rangsangan untuk dapat ditiru anak-anak dari anggota keluarga yang berstatus sosial tinggi berbeda dengan keluarga yang berstatus sosial rendah. Hal ini akan lebih tampak perbedaan perkembangan pendidikan bagi anak yang hidup di dalam keluarga terdidik dan tidak terdidik. Proses belajar tidak lepas dari kebutuhan sarana dan prasarana atau peralatan dan perlengkapan

belajar. Kebutuhan peralatan dan perlengkapan belajar anak dapat terpenuhi dengan baik apabila keadaan ekonomi orang tua juga baik.

Dengan peralatan dan perlengkapan belajar yang lengkap dan modern maka diharapkan proses belajar siswa didik atau anak berjalan dengan baik, sehingga berdampak langsung pada prestasi belajarnya. Prestasi belajar siswa dipengaruhi oleh banyak faktor yang salah satunya adalah kondisi sosial ekonomi orang tua, maka masih perlu orang tua untuk mencukupi kebutuhan belajar siswa untuk dapat meningkatkan prestasi belajar anaknya. Pendidikan bagi bangsa Indonesia merupakan modal sosial yang strategis dan realistis dalam pembangunan. Hal ini berkaitan dengan keberhasilan pembangunan tidak hanya dilihat dari segi ekonomi dan banyaknya material yang dimiliki, melainkan lebih ditentukan oleh kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Oleh karena itu, Indonesia memberikan perhatian yang serius terhadap pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak sampai jenjang perguruan tinggi, baik sekolah negeri maupun swasta, formal maupun informal. Semua itu merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya, sehingga mampu mengikuti pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dapat duduk sejajar dengan bangsa lain yang sudah maju. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 27 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang berbunyi sebagai berikut: Pendidikan Nasional berfungsi

mengembangkan kemampuan dan membentuk otak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu cakap, kreatif mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Dari hal yang telah disebutkan di atas, penyelenggaraan pendidikan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan berakhlak mulia. Bagi manusia, pendidikan merupakan usaha untuk meningkatkan kualitas hidup, memperbesar pemenuhan diri dari kebodohan, kemiskinan, dan keterbelakangan. Melalui pendidikan pula manusia dapat membuka tabir kehidupan, sekaligus menempatkan dirinya sebagai subyek perubahan dari kultural maupun struktural. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya pendidikan merupakan proses belajar yang tidak terbatas waktunya dan merupakan usaha untuk pencapaian kepuasan diri, harga diri serta aktualisasi diri.

Kondisi ekonomi dan pendidikan orang tua (sosial orang tua) juga akan berpengaruh terhadap kemajuan pendidikan anaknya. Pendapatan keluarga dan akses ke sumber daya ekonomi dapat memengaruhi akses terhadap pendidikan yang berkualitas. Keluarga dengan kondisi ekonomi yang lebih baik cenderung memiliki akses lebih baik terhadap pendidikan yang berkualitas,

termasuk akses terhadap sekolah yang baik, buku pelajaran, dan tutor tambahan. Keluarga yang telah tereduksi dalam melaksanakan pentingnya pendidikan akan lebih menyadari atau memahami kenapa mereka perlu mengusahakan pendidikan.

Sebaliknya, keluarga dengan kondisi ekonomi rendah sering menghadapi berbagai macam tantangan seperti biaya sekolah, kekurangan buku atau fasilitas lainnya, dan bahkan kebutuhan untuk membantu menghasilkan pendapatan keluarga. Hal ini dapat menyebabkan kesenjangan pendidikan antara kelompok ekonomi yang berbeda dan memperburuk ketimpangan sosial. Banyak anak-anak yang putus sekolah karena tidak ada biaya pendidikan. Untuk makan saja mereka masih harus bekerja keras dalam mendapatkan uang. Mereka mengesampingkan pendidikan karena dalam kondisi sebenarnya mereka merasakan bahwa mencari makan lebih penting daripada mencari ilmu.

Selain itu, faktor sosial ekonomi juga dapat memengaruhi kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kebanyakan masyarakat yang mampu mengenyam pendidikan tinggi adalah mereka yang memiliki kondisi sosial ekonomi yang tinggi pula (Marceylla, 2021). Pendidikan tinggi dianggap tidak terlalu penting karena pemerintah hanya mewajibkan pendidikan formal wajib sampai Sekolah Menengah Atas (SMA) saja. Pilihan untuk melanjutkan pendidikan akan terpengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi masyarakat tersebut. Masyarakat dengan kondisi sosial ekonomi

yang kurang akan lebih memilih bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Padahal pendidikan bisa dijadikan sebagai sarana peningkatan kemampuan untuk memperoleh keterampilan yang dibutuhkan untuk memasuki pasar kerja yang kompetitif.

1) Jenis Pembiayaan Pendidikan

Jenis pembiayaan pendidikan dapat diartikan sebagai segala sesuatu baik yang berbentuk fisik (uang) ataupun non fisik (bukan uang) dimana hal tersebut harus dikeluarkan selama menempuh pendidikan pada sebuah Lembaga pendidikan baik SD, SMP, ataupun SMA. Pada dasarnya, jenis pembiayaan pendidikan dapat dibedakan menjadi tiga jenis yaitu:

a) Biaya Langsung (direct cost) dan Tidak Langsung (indirect cost)

Menurut Anwar biaya langsung (direct cost) diartikan sebagai pengeluaran uang yang secara langsung membiayai penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat selama satu tahun dan berfokus pada aspek inti dalam proses pendidikan.

b) Biaya Pribadi (private cost) dan Biaya Masyarakat (social cost)

Biaya Pribadi (private cost), adalah biaya yang dikeluarkan keluarga untuk membiayai sekolah anaknya. Dengan kata lain, biaya pribadi adalah biaya sekolah yang dibayar oleh pihak keluarga atau individu.

c) Biaya Moneter (Monetary cost) dan Biaya Bukan Moneter (Non Monetary Cost)

Biaya moneter yaitu segala macam bentuk pengeluaran dalam bentuk uang untuk

kegiatan pendidikan, baik langsung ataupun tidak langsung. Sedangkan biaya bukan moneter adalah bentuk pengeluaran untuk pendidikan namun bukan dalam bentuk uang, tapi sejatinya bisa saja diuangkan. Lebih tepatnya biaya yang bernilai pengorbanan seperti waktu, tenaga, pikiran, dan lain-lain (Nurhalimah, 2019).

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti yaitu permasalahan yang terjadi di dalam pendidikan tentang mahal biaya pendidikan. Metode yang digunakan ialah studi kasus. Studi kasus adalah metode penelitian yang mendalam dan terperinci terhadap satu atau beberapa kasus yang spesifik, dengan tujuan untuk memahami secara mendalam tentang kasus tersebut. Pendekatan ini sering digunakan dalam ilmu sosial, ilmu kesehatan, pendidikan, dan bidang lainnya untuk mengeksplorasi fenomena kompleks di dalam konteks nyata.

Hasil penelitian kualitatif menekankan kepada makna daripada generalisasi (Abdussamad, 2022). Makna berkaitan dengan pemahaman spesifik tentang suatu konsep dalam keadaan aslinya secara alamiah, sementara generalisasi melibatkan tentang pernyataan umum berdasarkan pola atau informasi yang lebih umum yang kemudian mengerucut menjadi sebuah hasil. Kusumastuti & Khoiron (2019) juga menjelaskan bahwa penelitian kualitatif

dilakukan dengan mengeksplorasi dan memahami makna tentang hal yang timbul dari permasalahan sosial yang kemudian dianalisis dan ditafsirkan dengan metode yang sesuai.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

Pembiayaan dalam pendidikan menjadi salah satu aspek yang sangat penting untuk dikaji. Apabila dianalogikan sebagai sebuah kendaraan, maka pembiayaan sebagai bahan bakar, sementara pendidikan sebagai kendaraannya. Diciptakannya kendaraan, tentu memiliki tujuan tertentu, dalam hal ini tujuan itu ialah usaha untuk mencetak generasi penerus bangsa yang dididik agar dapat menjadi pionir dalam mewujudkan cita-cita pendiri bangsa terdahulu. Dalam usaha tersebut, tentu pemerintah memiliki andil yang besar dalam perwujudannya. Pada pembukaan UUD RI Tahun 1945 alinea keempat, disebutkan bahwa tujuan negara yaitu ‘‘mencerdaskan kehidupan bangsa’’. Hal ini memiliki konsekuensi bahwa negara bertanggung jawab memfasilitasi pendidikan bagi seluruh rakyat agar memiliki kecerdasan sesuai minat dan bakat (Huda & Hidayat, 2021). Tidak hanya itu, amanat dalam UUD RI Tahun 1945 Pasal 31, disebutkan bahwa ‘‘tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran’’. Tentu pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah harus menyelenggarakan serta menjamin pemerataan

pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia (Sunarsih, 2022). Namun sangat disayangkan, kenyataannya tidak semua orang dapat memperoleh pendidikan yang semestinya. Hal ini tentu disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya karena mahalnya biaya pendidikan yang harus dikeluarkan.

Seyogyanya penelitian berkenaan dengan pembiayaan dalam pendidikan telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu, diantaranya penelitian oleh Nurhayati et al., (2022), yang berjudul, ‘‘Manajemen Pembiayaan Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Lembaga Pendidikan Islam’’, hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa manajemen pembiayaan merupakan proses pengoptimalan, alokasi, dan distribusi sumber dana untuk mendukung efektivitas dan efisiensi dalam proses pembelajaran, sehingga menciptakan kondisi belajar mengajar yang lebih baik. Penelitian oleh Rasyidah et al., (2022), yang berjudul, ‘‘Pembiayaan Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu PAI di SD Muhammadiyah Ngestiharjo’’, pada hasil penelitiannya menginformasikan bahwa dengan pengelolaan pembiayaan sekolah yang baik serta disokong dengan bantuan dari pemerintah, maka hal tersebut berimplikasi pada peningkatan mutu pendidikan yang ada di SD Muhammadiyah Ngestiharjo, sehingga visi dan misi sekolah dapat tercapai.

Sementara itu, penelitian oleh Ahmad (2020), yang berjudul, ‘‘Kajian Kritis Landasan Hukum Pembiayaan Pendidikan Di Indonesia’’, adapun tujuan penelitiannya yaitu menganalisis kebijakan pembiayaan

pendidikan di Indonesia, serta menganalisis praktik penyelenggaraan pembiayaan pendidikan di Indonesia sesuai dengan amanat UUD 1945 dan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sedangkan Anwar (2017), dalam jurnalnya yang berjudul, ‘‘Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan: Studi Efektifitas Kepemimpinan Kepala Sekolah’’, hasil penelitiannya menunjukkan adanya pengaruh yang positif dan signifikan kepemimpinan kepala sekolah terhadap manajemen keuangan. Semakin efektif kepemimpinan, semakin efisien pengelolaan keuangan. Dengan kata lain, jika variabel kepemimpinan kepala sekolah memiliki standar kualitas yang baik, maka pengelolaan pembiayaan pendidikan yang diharapkan akan lebih baik.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Purba et al., (2023), yang berjudul, ‘‘Problematika Pembiayaan Pendidikan di Sekolah’’, hasil penelitiannya menyebutkan bahwa dengan adanya keterbukaan, partisipasi, akuntabilitas antara pihak sekolah dan stakeholder terkait dalam penyelenggaraan pendidikan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, tentu hal tersebut akan mewujudkan efektivitas pembiayaan dalam pendidikan.

Secara etimologi, kata pembiayaan terambil dari kata "biaya" yang berasal dari bahasa Belanda, yaitu *kosten*. Sementara dalam bahasa Latin, disebut *causa* yang berarti sebab atau alasan. Sehingga biaya merujuk pada pengeluaran yang berkaitan dengan penyebab atau alasan tertentu. Sedangkan

secara terminologi, biaya merujuk pada jumlah uang atau sumber daya yang dikeluarkan atau diperlukan untuk memperoleh atau melakukan suatu aktivitas atau layanan (Purwanti, 2023). Pembiayaan merupakan pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dalam artian biaya sebagai pengorbanan ekonomis yang dibuat untuk memperoleh barang atau jasa.

Ketika kata pembiayaan disandingkan dengan kata pendidikan, menjadi pembiayaan pendidikan, maka dapat diartikan sebagai jumlah uang yang dihasilkan dan dibelanjakan untuk berbagai keperluan penyelenggaraan pendidikan di sekolah/madrasah. Selain itu, Levin menyatakan bahwa biaya pendidikan dapat dikatakan sebagai proses mengelola pendapatan dan sumber daya yang tersedia untuk digunakan dalam menyusun dan menjalankan roda kehidupan sekolah pada tingkatan yang berbeda-beda (Fatimah, 2019). Sementara Nanang Fattah mengungkapkan bahwa pembiayaan pendidikan merupakan jumlah uang yang harus dihasilkan dan dibelanjakan untuk keperluan penyelenggaraan pendidikan mencakup gaji guru, peningkatan profesional guru, pengelolaan tata usaha, pengadaan alat dan buku pembelajaran, kegiatan ekstrakurikuler, pengadaan sarana dan prasarana sekolah, Alat Tulis Kantor (ATK), supervise pendidikan, dan masih banyak lagi.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan pendidikan merupakan dana yang diberikan atau

dihasilkan sekolah yang bersumber dari berbagai pihak untuk memfasilitasi setiap kegiatan pembelajaran yang ada di sekolah baik di dalam ataupun di luar kelas, yang pada intinya dana tersebut dipergunakan untuk keperluan penyelenggaraan pendidikan secara utuh.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Program Indonesia Pintar (Permendikbud, 2016). Pasal 4 Ayat 1: PIP diperuntukkan bagi anak berusia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun dengan prioritas antara lain: poin (a) peserta didik pemegang KIP, (b) peserta didik dari keluarga miskin/rentan miskin dan/atau dengan pertimbangan khusus seperti: angka 1) peserta didik dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH), 2) peserta didik dari keluarga pemegang KKS, 3) peserta didik yang berstatus yatim piatu/yatim/piatu dari sekolah/panti sosial/panti asuhan, 4) peserta didik yang terkena dampak bencana alam, 5) peserta didik yang tidak bersekolah (drop-out) yang diharapkan kembali bersekolah, 6) peserta didik yang mengalami kelainan fisik, korban musibah, dari orang tua PHK, di daerah konflik, dari keluarga terpidana, berada di Lembaga Pemasyarakatan, memiliki lebih dari 3 (tiga) saudara yang tinggal serumah, dan/atau 7) peserta pada lembaga kursus atau satuan pendidikan nonformal lainnya.

1. Sumber Pembiayaan Pendidikan di Indonesia

Sumber pembiayaan pendidikan merujuk pada semua sumber dana atau sumber keuangan yang digunakan untuk mendukung operasional dan penyelenggaraan sistem pendidikan (Komariah, 2018). Tidak semua sekolah memiliki sumber pembiayaan yang cukup sesuai dengan program yang akan dicanangkan, maka pembiayaan pendidikan menjadi hal yang menarik untuk dibicarakan dan digali kemungkinan yang mampu menjadi solusi atas permasalahan tersebut. Sekolah tidak akan berkembang dengan baik jika hanya mengandalkan sumber dari pemerintah saja. Sekolah berkualitas membutuhkan biaya investasi dan biaya operasional yang sangat besar. Jika sekolah hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah saja, sekolah tidak akan mampu tumbuh dan berkembang dengan baik, bahkan cenderung kekurangan anggaran sehingga mengakibatkan kualitas sekolah menjadi turun (Sriwahyuni, 2022). Oleh karena itu, perlu adanya pencarian sumber dana lain selain dana dari pemerintah, seperti dari komite sekolah, dan pihak lainnya. Berikut penjabaran sumber-sumber pembiayaan pendidikan yang diterapkan oleh sekolah secara umum:

a. Pemerintah Pusat

Dana yang berasal dari pemerintahan pusat seperti dana BOS

b. Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah memiliki bantuan berupa Biaya Operasional Pendidikan (BOP) yang dialokasikan sebesar 20% sesuai amanat Undang-Undang

c. Komite Sekolah

Komite sekolah merupakan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan. Komite sekolah dibentuk atas prakarsa dari masyarakat dan sudah diatur dalam UU. SPN No 20 tahun 2003 pasal 56 ayat 3 menyatakan komite sekolah/madrasah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. Jadi komite sekolah harus mampu menyakinkan orang tua, pemerintah setempat, dunia usaha dan masyarakat pada umumnya bahwa sekolah itu dapat dipercaya. Salah satu peran sekolah adalah mobilisasi sumbangan. Adapun penggunaan dana komite di alokasikan antara lain jenis-jenis pengeluaran orang tua/wali siswa untuk pendidikan antara lain, (a) Uang pangkal, (b) Uang sekolah bulanan/SPP, (c) Biaya ulangan tengah semester, (d) Biaya ulangan akhir semester, (e) Biaya kegiatan ekstrakurikuler, (f) Biaya Kegiatan Praktikum, (g) Pembelian Buku Pelajaran/LKS, (h) Pembelian pakaian seragam sekolah, (i) Biaya karyawan/bina mental, (j) Sumbangan sosial, dan lainnya (Hadi, 2021).

- d. Kelompok Masyarakat
- e. Swadaya sekolah
- f. Sumber lainnya, dari bantuan luar negeri, program BAZNAS, sponshorship perusahaan, hibah, wakaf, infaq dan shadaqah. Serta

bantuan perorangan atau bantuan dari yayasan tempat bernaung lembaga pendidikan itu sendiri.

Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah/Madrasah (RAPBS/M). Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah/Madrasah atau yang disingkat dengan RAPBS/RAPBM, merujuk pada rencana anggaran penerimaan dan penggunaan dana serta pengelolaannya dalam memenuhi seluruh keperluan sekolah selama satu tahun. Selain itu dapat juga diartikan sebagai tata cara kelola yang meliputi dua komponen, yaitu pendapatan/sumber biaya dan pengeluaran/belanja sekolah (Nurmalasari et al., 2019).

Pendapatan sekolah adalah segala penerimaan yang diperoleh sekolah yang berupa uang atau setara uang (buku, peralatan, bahan-bahan, dan lain-lain) dalam satu tahun anggaran. Sedangkan belanja sekolah adalah segala pengeluaran yang dilakukan sekolah dalam bentuk uang atau setara uang dalam satu tahun anggaran. Pendapatan tersebut dapat bersumber dari berbagai pihak, sebagaimana yang telah dijelaskan di awal, sumber pendapatan sekolah dapat bersumber dari pemerintah seperti APBN, APBD baik provinsi maupun kabupaten/kota, komite sekolah, Sumbangan Pelaksanaan Pendidikan (SPP), Bantuan Pengembangan Pendidikan (BPP), biaya pendaftaran murid baru, biaya ujian akhir semester, biaya ujian akhir sekolah, iuran perpustakaan, iuran uang gedung, iuran ekstrakurikuler.

RAPBS/RAPBM disusun oleh kepala sekolah dengan melibatkan berbagai unsur seperti wakil kepala sekolah, dewan guru, bendahara sekolah, komite sekolah, staf Tata Usaha, dan komunitas sekolah lainnya (Al Ikbal & Astuti, 2023). Secara sistematis, anggaran RAPBS dimulai dengan rapat Rencana Kerja Sekolah (RKS) atau pun biasa disebut dengan Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM). RKS/RKJM disusun selama kurun waktu 4 tahun dan menggambarkan tujuan yang akan dicapai berkaitan dengan mutu lulusan serta perbaikan komponen yang mendukung peningkatan mutu lulusan. Dari RKS kemudian diturunkan menjadi Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS). Setelah semua perencanaan kegiatan RKAS disusun, selanjutnya diturunkan lagi menjadi Rencana Anggaran Tahunan (RKT). Setelah itu, dari RKT diturunkan lagi menjadi RAPBS/RAPBM, yang dilaksanakan setiap satu tahun sekali. Dalam tahap ini tentu pengelolaan keuangan yang meliputi perencanaan, penggunaan, pencatatan, serta pelaporan pertanggungjawaban dana yang dialokasikan harus jelas dan transparan, agar tidak menimbulkan pertanyaan ataupun dugaan-dugaan negatif yang justru dikhawatirkan akan merusak citra sekolah, dan tentu kepala sekolah memiliki tanggung jawab sangat besar perihal ini.

Dalam konteks pengalokasian atau distribusi anggaran pendidikan, maka fungsi pemimpin sekolah/madrasah sangat menentukan keberhasilan dalam pengoptimalan dana karena sebagai pemangku

jabatan tertinggi di sekolah. Beberapa Langkah yang dapat ditempuh kepala sekolah dalam penyusunan RAPBS/RAPBM sebagai berikut (Faslah & Mujahid, 2023):

1. Langkah pertama, kepala sekolah sebagai inisiator untuk membuat tim khusus penyusun RAPBS/RAPBM yang meliputi kepala sekolah itu sendiri, wakil kepala sekolah semua bidang, bendahara sekolah, dewan guru, staf TU, dan komite sekolah.
2. Langkah kedua, wakil kepala sekolah bertugas merencanakan program sekolah dengan menganalisis kebutuhan sekolah selama satu tahun. Terutama Menyusun program didasarkan pada skala prioritas, kemudian perencanaan tersebut disampaikan kepada kepala sekolah.
3. Langkah ketiga, wakil kepala sekolah akan menentukan program kerja. Kepala sekolah biasanya memiliki lima wakil kepala sekolah dan masing-masing memiliki program kerja. Wakil kepala sekolah bidang kesiswaan memiliki program yang berkaitan dengan ekstrakurikuler siswa, seperti OSIS, pramuka, maupun perlombaan-perlombaan yang akan diikuti oleh siswa, seperti olimpiade, ataupun lomba lainnya. Wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana bertanggung jawab terhadap semua sarpras baik yang dipakai habis ataupun tidak. Wakil kepala sekolah bidang kurikulum memiliki tugas untuk merancang dan merencanakan kurikulum sekolah dengan baik serta mendukung pengembangan profesional guru dalam hal

kurikulum. Ini termasuk memberikan pelatihan, workshop, dan sumber daya kepada guru untuk membantu mereka mengimplementasikan kurikulum dengan baik. Wakil kepala sekolah bidang humas memiliki program membangun kerjasama dengan instansi pendidikan lainnya.

4. Langkah keempat, kepala sekolah selanjutnya menetapkan program berdasarkan skala prioritas yang telah disampaikan oleh wakil kepala sekolah, dan kemudian melakukan analisis kebutuhan. Hal ini penting dilakukan agar semua program dapat terlaksana dengan baik.
5. Langkah kelima, kepala sekolah beserta bendahara menghitung dana sekolah yang dibutuhkan agar cukup dalam memenuhi pelaksanaan program. Bila hipotesis dana kurang, maka kepala sekolah akan menentukan program yang diprioritaskan terlebih dahulu untuk diimplementasikan.
6. Langkah terakhir, kepala sekolah menentukan dari mana saja sumber dana yang akan didapatkan untuk membiayai rencana kegiatan ataupun kebutuhan operasional sekolah.

KESIMPULAN

Pendidikan merupakan proses penting dalam kehidupan manusia untuk mengembangkan potensi dan keterampilan mereka, serta mempersiapkan mereka menghadapi kehidupan dengan lebih baik. Meskipun pemerintah telah mengatur pendidikan melalui berbagai peraturan dan

menyediakan bantuan finansial seperti BOS, tantangan seperti aksesibilitas, kualitas pendidikan, dan biaya yang tinggi masih menjadi kendala utama. Masih banyak anak yang terhalang untuk melanjutkan pendidikan karena masalah biaya, meskipun sudah ada bantuan dari pemerintah. Peningkatan infrastruktur dan perhatian lebih lanjut terhadap kesenjangan pendidikan di berbagai daerah masih perlu dilakukan untuk memastikan setiap anak mendapatkan kesempatan yang sama dalam mendapatkan pendidikan yang berkualitas.

Pembiayaan pendidikan merupakan aspek krusial yang menopang kelangsungan dan kualitas pendidikan. Sebagai metafora, pembiayaan adalah "bahan bakar" yang diperlukan untuk menggerakkan "kendaraan" pendidikan menuju tujuan-tujuan nasional seperti mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diamanatkan oleh UUD RI Tahun 1945. Meskipun pemerintah telah menyusun kebijakan dan program seperti Program Indonesia Pintar untuk memfasilitasi akses pendidikan bagi semua lapisan masyarakat, masih terdapat tantangan dalam pemenuhan hak pendidikan yang merata bagi semua warga negara, terutama terkait dengan biaya pendidikan yang tinggi. Penelitian terkait manajemen dan efektivitas pembiayaan pendidikan menunjukkan bahwa pengelolaan yang baik dapat meningkatkan mutu pendidikan secara keseluruhan, namun masih dibutuhkan upaya lebih lanjut untuk mengatasi berbagai kendala yang ada. Salah satu cara yang dapat diusahakan dalam menangani

problematika tersebut ialah dengan membenahi Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah/Madrasah (RAPBS/RAPBM).

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah/Madrasah (RAPBS/RAPBM) merupakan rencana anggaran yang penting dalam manajemen keuangan sekolah. RAPBS/RAPBM menggambarkan secara rinci bagaimana pendapatan sekolah akan diperoleh dan bagaimana belanja sekolah akan dialokasikan dalam satu tahun anggaran. Pendapatan sekolah bisa berasal dari berbagai sumber seperti APBN, APBD, sumbangan masyarakat, dan biaya-biaya lainnya seperti SPP dan BPP. Proses penyusunan RAPBS/RAPBM melibatkan berbagai pihak di sekolah, termasuk kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dewan guru, bendahara sekolah, dan komite sekolah. RAPBS/RAPBM dibuat berdasarkan Rencana Kerja Sekolah (RKS) atau Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) yang lebih panjang, dan kemudian diturunkan menjadi Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) serta Rencana Anggaran Tahunan (RKT) sebelum akhirnya menjadi RAPBS/RAPBM yang dilaksanakan setiap tahun. Pemimpin sekolah memiliki peran krusial dalam mengoptimalkan penggunaan dana sekolah.

Langkah-langkah yang ditempuh oleh kepala sekolah dalam penyusunan RAPBS/RAPBM meliputi pembentukan tim penyusun, analisis kebutuhan sekolah, penentuan prioritas program, analisis kebutuhan dana, penghitungan anggaran yang

dibutuhkan, dan pengalokasian sumber dana yang tersedia untuk membiayai program-program sekolah. Dengan demikian, RAPBS/RAPBM tidak hanya sebagai instrumen pengelolaan keuangan sekolah, tetapi juga sebagai alat untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah/madrasah.

SARAN

Dari penelitian yang telah terlaksana, maka peneliti menyarankan kepada seluruh elemen masyarakat untuk selalu mendukung terlaksananya pendidikan. Keluarga sebagai benteng utama dalam memberikan pendidikan harus selalu mendukung anak-anak dalam menerima ilmu. Sedangkan masyarakat dan pemerintah harus sadar bahwa pendidikan adalah investasi bagi bangsa. Oleh karena itu, pemerintah bersama jajarannya harus bisa mengatasi mberbagai problematika yang menghambat terlaksananya pendidikan terutama problematika mahalny biaya pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Pristiwanti, D., Badariah, B., Hidayat, S., & Dewi, R. S. (2022). Pengertian pendidikan. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 4(6), 7911-7915.
- Djamaluddin, A. (2014). Filsafat pendidikan. *Istiqra: jurnal pendidikan dan pemikiran islam*, 1(2).

- Marceylla, D. V., & Subroto, W. T. (2021).
Pengaruh Status Sosial Ekonomi
dan Tingkat Pendidikan Orang
Tua Terhadap IPK Mahasiswa
Pendidikan Ekonomi Unesa.
Jurnal Pendidikan Ekonomi
(JUPE), 36-42.
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003
Tentang Tujuan Pendidikan
Nasional. (2003).